SOSIALISASI POLITIK PARTAI BULAN BINTANG (PBB) DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

Oleh:
YOGIE ANDREAN
NIM. E02112023
Dr. Saherimiko, M.Si[2], Ully Nuzulian, S.IP, M.Si[2]
*Email: yogieandreans.ip@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat sosialisasi politik Partai Bulan Bintang di Kecamatan Pontiank Kota Dapil 1 pada Pemilu Legislatif tahun 2014 belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Latar belakang Partai Bulan Bintang ini terkait mobilisasi anak (remaja) yang di libatkan dalam massa kampanye terbuka kemudian rendahnya derajat hubungan keterlibatan aktif anggota partai terhadap masyarakat dan masih cenderung bersifat tertutup. Hal ini menjadi objek kajian yang menarik bagi peneliti, kurang harmonisnya hubungan kedekatan partai dengan masyarakat membuat masyarakat kurang simpati kepada Partai Bulan Bintang untuk memberikan suara pada pemilu legislatif tahun 2014 lalu. masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota memiliki partisipasi yang cukup tinggi dalam pemilu, adanya hubungan ikatan-ikatan tertentu (agama) tidak mempengaruhi suara masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Untuk menjawab penelitian peneliti menggunakan tiga faktor penghambat menurut Rush dan Althoff bahwa, faktor yang menyebabkan sosialisasi politik belum berjalan optimal di gunakan analisis tiga faktor penghambat yaitu, pertama, kendala pola sosialisasi politik, kedua, kendala sosial ekonomi, dan ketiga, kendala sistem politik. Kemudian dari hasil penelitian dan analisa peneliti melalui ke tiga faktor penghambat tersebut bahwa sosialisasi politik Partai Bulan Bintang yang belum berjalan secara maksimal yang di pengaruhi oleh salah satunya adalah kendala pola sosialisasi politik Partai Bulan Bintang.

Kata kunci : Partai Bulan Bintang, Pemilu Legislatif, Sosialisasi Politik, Mobilisasi Anak.

ABSTRACT

This undergraduate thesis aims to find out the inhibiting factors for the political socialization of the Crescent Star Party in the Municipal Pontianak Sub-District, Election Area 1 y in the 2014 Legislative Elections which was optimal. This research uses a qualitative research method with descriptive research type. The background of the Crescent Star Party is related to the mobilization of children (teenagers) involved in the mass of the open campaign and then the low rate of active involvement of party members to the community and still tends to be closed. This is an interesting object of study for research; the lack of harmony between the party's closeness with the community makes the community less sympathetic to the Crescent Star Party to vote for them in the 2014 legislative elections. Communities in Municipal Pontianak Sub-district have fairly high participation in elections; the relationship of certain ties (religion) did not effect the votes of the community in Municipal Pontianak Sub-district election area 1 in the 2014 Legislative Elections. To answer the research questions, this research used three inhibiting factors according to Rush and Althoff who said that the factors causing political socialization are not running optimally using and analysis of three factors namely, first, constraints of the pattern of political socialization; second, sosio-economic constraints; and third, constraints of the political system. Then from the results of the research and analysis of the research through the three inhibiting factors that the political socialization of the Crescent Star Party did not run optimally which was affected by one of the constraints that is the political pattern of the Crescent Star Party.

Keywords: Crescent Star Party, Legislative Elections, Political Socialization, Child Mobilization.

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang Masalah

Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi salah satu dari dua partai politik yang terganjal proses verifikasi yang di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah di nyatakan tidak lolos peserta pemilu 2014, PBB langsung bergegas untuk mempersiapkan persiapan dengan menempuh jalur prosedural dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kebetulan awal maret tahun 2013 gugatan PBB di terima oleh PT TUN dan otomatis mengabulkan PBB menjadi salah satu peserta pemilu 2014.

Dalam amar putusannya PT TUN menyebutkan, pertama mewajibkan kepada KPU membatalkan atau mencabut SK Nomor 5 tentang partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu 2014. Kedua, mewajibkan KPU menerbitkan SK baru sebagai peserta pemilu 2014. Pasca di putuskannya PBB oleh PT TUN menjadi peserta pemilu 2014 tidak serta merta menjadikan partai ini bisa berbangga diri, karena KPU juga bertekad melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan PT TUN, tapi untungnya KPU mengalah dan mempersilahkan PBB menjadi peserta pemilu 2014.

Selanjutnya di beberapa lembaga survey kotemporer yang di gelar menunjukkan elektabilitas partai Islam menurun sangat drastis. Ini berarti partai Islam kurang menarik di banding dengan partai Nasionalis. Meredupnya beberapa

partai Islam selama ini menjadi tolak ukur sulitnya Partai Bulan Bintang (PBB) untuk dapat bersaing di pemilu 2014 lalu.

Adapun tahapan awal sosialisasi politik yang dilakukan Partai Bulan Bintang di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 yaitu; Pertama, melakukan pemasangan atribut-atribut partai dan kemudian membagikan selebaran kartu nama identitas caleg kepada masyarakat sebagai awal dari tahapan sosialisasinya. Selain itu, selama massa kampanye terbuka PBB juga melakukan adanya kegiatan-kegiatan *tournament* kecil seperti lomba catur, karouke, dan kegiatan kurban lainnya sebagai awal tahapan kedekatan hubungan PBB kepada masyarakat.

Namun di dalam aktivitas kegiatan kampanye yang di lakukan di tempat terbuka, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung tim atau pelaksana mengikutsertakan dan/atau melibatkan anak (remaja) yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih di libatkan di dalam kampanye kegiatan tersebut agar dapat menarik simpatik dan dukungan dari masyarakat.

Sedangkan di dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu, mengikut sertakan dan/atau melibatkan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih di larang saat kampanye. Seperti yang di jelaskan pada pelarangan dalam kampanye yang di atur dalam pasal 280 ayat (2) huruf K UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut berbunyi dan menjelaskan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu di larang mengikut sertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih. Aturan serupa tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian selanjutnya walaupun sosialisasi politik yang di lakukan PBB di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 di lakukan selama massa kampanye pemilu namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berada di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 tidak memberikan suara untuk PBB. Meskipun Partai Bulan Bintang merupakan partai Islam. Sedangkan di Kecamatan Pontianak Kota mayoritas orang beragama muslim, tetapi tidak mempengaruhi masyarakat untuk mendukung Partai Bulan Bintang, karena masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 memilih caleg tidak berdasarkan agama tertentu, tetapi dari ide, gagasan, ataupun rekam jejak sih caleg serta visi dan misi dan pantas atau tidaknya seseorang untuk menjadi anggota legislatif.peran aktif dari calon legislatif PBB di Kecamatan Pontianak Kota dalam mensosialisasikan kegiatan yang bermanfaat agar masyarakat memberikan suara mereka untuk PBB.

YOGIE ANDREAN, NIM. E02112023
Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN

Selain itu, peran dan tahapan sosialisasi politik yang di lakukan oleh PBB juga tidak sepenuhnya menonjolkan adanya usaha yang benar-benar konkret di lakukan oleh anggota partai maupun caleg untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat di daerah pilihannya. Karena pada umumnya, hubungan PBB kepada masyarakat juga belum terlihat begitu dekat dan harmonis kepada masyarakat. Khususnya di wilayah Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1.

Maka tidak heran jika masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 kurang simpatik terhadap PBB. Selain itu, Parpol juga sering di anggap kurang mampu menjalankan fungsi nya dengan baik. Maka tidak jarang bila masyarakat semakin tambah apatis dan memberikan pandangan minor terhadap partai politik. Problematik lain, kelemahan pada parpol saat ini juga kian terlihat, bisa di perhatikan bahwa sepanjang tahun sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti seperti tidak memiliki program rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan pendek. Kecuali pada saat menjelang pemilu saja. Dari hasil pra penelitian yang di dapatkan, hasil data pemilih tahun 2009 di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 berjumlah 49.821 orang, sedangkan jumlah suara yang sah dari PBB berjumlah 903 orang. Pada tahun 2014 jumlah pemilih di Kecamatan Pontianak Kota yaitu sebanyak 62.013 orang, sedangkan jumlah suara sah PBB pada tahun 2014 yaitu 1.031 orang. Dengan jumlah demikian PBB di Kecamatan Pontianak Kota pada tahun 2009 dan 2014 tidak mendapatkan kursi DPRD kota. Jadi pada PBB tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pemilu legislatif, khususnya untuk di wilayah Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1.

Dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dan ingin melakukan penelitian dengan judul "Sosialisasi Politik Partai Bulan Bintang di Kecamatan Pontianak Kota Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014". Titik pusat penelitian ini berada di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1.

A.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut ada banyak permasalahan yang ingin di bahas akan tetapi agar bahasan ini tidak terlalu luas peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan tentang :

a. Ada Pola Sosialisasi Politik PBB yang memobilisasi anak (remaja) di libatkan di dalam kampanye.
b. Ada sosialisasi politik PBB yang masih cenderung bersifat tertutup.

A.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan bahwa terdapat beberapa fungsi partai politik. Agar lingkup di dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini di fokuskan pada " Faktor

YOGIE ANDREAN, NIM. E02112023
Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN

Penghambat Sosialisasi Politik PBB di Kecamatan Pontianak Kota di Dapil 1 pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

A.4. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis dapat merumuskan persoalan atau masalah dalam bentuk rumusan masalah, Apa Faktor penghambat Sosialisasi Politik PBB di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 pada Pimilu Legislatif tahun 2014 belum optimal ?

A.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penghambat sosialisasi politik PBB di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 pada Pemilu Legislatif tahun 2014 belum optimal.

A.6. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis; Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan Ilmu Politik khususnya kajian tentang sosialisasi politik, serta dapat di jadikan kajian dan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk mencapai kesempurnaan dalam penelitian berikutnya. Manfaat Praktis; Hasil penelitian ini di harapkan nantinya dapat di jadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran baik untuk PBB maupun partai lainnya dan serta menambah untuk kapasitas parpol.

B. KAJIAN PUSTAKA

B.1. Partai Politik

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu secara langsung membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 di Indonesia di nilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat di katakan bahwa sistem perpolitikan nasional di pandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencangkup penataan partai politik.

Keberadaan partai politik merupakan suatu keharusan dalam sebuah kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik memiliki arti yang sangat penting karena tidak ada sistem politik yang berjalan tanpa peran partai politik, kecuali sistem politik yang menganut otoritarian atau sistem kekuasaan tradisional. Menurut Ware A. (2009) dalam kehidupan fungsi utama partai politik adalah bersaing untuk memenangkan pemilihan umum, mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat, menyediakan alternatif kebijakan, dan mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintah. (Leli Salman 2015, 10).

YOGIE ANDREAN, NIM. E02112023
Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN

Menurut Budiardjo (1996:163), ada empat fungsi partai politik, yaitu sebagai berikut :

1. Sarana Komunikasi Politik
Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah.
2. Sarana Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu Negara.
3. Sarana Rekrutmen Politik
Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik ataupun pemerintah.
4. Sarana Pengatur Konflik
Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Partai politik juga menjadi sarana sosialisasi politik dalam usaha menguasai pemerintahan melalui perjuangannya dalam pemilihan umum partai politik harus mencipkatan dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai politik berusaha menciptakan *"image"* bahwa ia mewakili rakyat, karena itu selain menanamkan solidaritas dengan partai, juga harus dapat mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dengan berusaha menempatkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan nasional (Budiardjo, 1996:164).

Sosialisasi menunjukan pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. (Almond,1990:67). Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya. Ini sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.

B.2. Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan istilah Pemilu menurut Matori Abdul Djalil (dalam Marulak Pardede, 2014 : 86) antara lain memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*Transfer of Leader and Power*) secara konstitusional untuk melahirkan kepemimpinan legitimatif, Pemilu adalah wujud dari pelaksanaan kedualatan rakyat (*Sovereignity*) secara mendasar di negara demokrasi, Pemilu dimaksudkan sebagai wahana formal untuk membentuk tatanan negara dan masyarakat

YOGIE ANDREAN, NIM. E02112023
Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN

(*State and Social Formation*) menuju tatanan yang lebih baik; dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pemikiran rakyat.

Pemilu merupakan instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, tentu saja dalam teknis pelaksanaannya membutuhkan aturan-aturan yang spesifik, meski demikian pemilu saja bukanlah merupakan suatu jaminan dari demokrasi itu sendiri, akan tetapi pemilu merupakan cara dari didapatkannya legitimasi atas kekuasaan bagi rezim dalam memerintah. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan.

Pemilihan umum merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi Negara demokrasi. Sebagai sistem, demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi, yang populis, adil dan beradap, kendati bukan tanpa kelemahan. (Moesafa dan Prihatmoko, 2008:43**)**

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye merupakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara tanggung jawab, dilaksanakan oleh partai politik atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU sesuai daerah pemilihan. Melakukan kegiatan kampanye dengan melibatkan anak (remaja) dalam kegiatan kampanye pemilu baik itu secara langsung ataupun tidak langsung adalah kegiatan yang dilarang.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (2) tentang kampanye pemilu telah diatur tegas mengenai larangan dalam berkampanye, bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan :

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada mahkamah agung dan hakim pada semua badan peradilan dibawah mahkamah agung, dan hakim konstitusi pada mahkamah konstitusi.
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.
d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah.
e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.
f. Aparatur sipil negara.
g. Anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia.
h. Kepala desa
i. Perangkat desa
j. Anggota badan permusyawaratan desa ; dan

k. Warga negara indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu bahwa, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Seperti yang telah dijelaskan pada pelarangan kampanye yang mengikutsertakan warga negara indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Yang telah diatur didalam pasal 280 ayat (2) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut berbunyi pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan warga negara indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Aturan serupa tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Selain itu didalam turunan konstitusional kita terhadap perlindungan anak, dijelaskan dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a.) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
b.) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
c.) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
d.) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
e.) Pelibatan dalam peperangan; dan
f.) Kejahatan seksual.

Dari huruf A sangat jelas bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari setiap penyalahgunaan kegiatan sebuah partai politik dalam kampanye sewaktu Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum Legislatif, ataupun Pemilihan Umum Kepala Daerah.

B.3. Konsep Sosialisasi Politik

Menurut David F. Aberle (1961), sosialisasi politik merupakan pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu berbagai keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif, dan sikap yang perlu untuk menampilkan peranan yang sekarang atau sedang di antisipasikan (dan terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia norma dan peranan-peranan baru masih dipelajari (dalam Gatara dan Said, 2007 : 77).

Sosialisasi politik adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi diantara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politiknya yang relevan. Sosialisasi politik juga merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik merupakan proses yang berlangsung lama yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi diantara individu dengan pengalaman-pengalaman politik

yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada. Selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Rush dan Althoff,2011 :47)

Adapun Fungsi sosialisasi menurut Rush dan Althoff adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Misalnya di Indonesia menganut ideologi negara yaitu Pancasila. Oleh sebab itu sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi diberlakukan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum.

b. Selain itu, sosialisasi politik juga bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Apa jadinya suatu negara atau bangsa jika warga negaranya tidak tahu warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri ? Mereka akan menjadi warga negara tanpa identitas, tentunya.

Sosialisasi politik sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, jika proses sosialisasi politik tidak dapat berjalan dengan baik, maka dapat menyebabkan ketidakstabilan situasi politik suatu Negara.Karena sosialisasi politik merupakan faktor terpenting bagi setiap individu maupun kelompok yang berada di wilayah tersebut.

Menurut Rush dan Althoff (2002-37) mengemukakan beberapa unsur kendala yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi sosialisasi politik belum berjalan secara optimal antara lain :

a. Kendala pola sosialisasi politik merupakan tahapan-tahapan yang dilalui suatu partai dalam pelaksanaan sosialisasi politiknya. Bagaimana pengurus sebagai agen sosialisasi parpol dapat mensosialisasikan partainya melalui mekanisme yang telah di tentukan sehingga dapat di terima masyarakat terutama yang menjadi sasaran utamanya apabila pola-pola ini tidak terlaksana dengan baik maka masyarakat sebagai sasaran utama pun menjadi kurang simpatik untuk memilih partai tersebut.

b. Kendala Sosial ekonomi yakni lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai dalam membangun suatu organisasi politik dan rendahnya tentang pengetahuan politik menyebabkan beban ganda bagi partai tersebut.

c. Kendala Sistem politik yakni keseimbangan dalam partai politik selalu berubah sehingga system politik dalam sebuah partai politik lebih bersifat dinamis ketimbang statis.

YOGIE ANDREAN, NIM. E02112023
Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN

Pengaruh keseimbangan ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh lingkungan *intrasocietal* dan *exstrasocietal*. Pengaruh tersebut membuat perimbangan kekuatan antar struktur formal berubah.

C.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Yaitu untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti mengenai suatu keadaan gejala atau objek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Yang bertujuan untuk menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Rianse dan Abdi (2009-18).

Penelitian ini yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai fenomena-fenomena politik yang terjadi di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1. Harrison (2009:91) mengungkapkan bahwa riset politik dengan metode kualitatif cenderung punya banyak kualitas yang "*personable*". Artinya, kita dapat mengenal orang atau kelompok orang yang kita riset, sering kali tingkat pengenalan kita melebihi dari yang semestinya dibutuhkan untuk proyek riset, bahkan periset bisa melihat dunia politik dari perspektif mereka.

Subjek dalam penelitian untuk memperoleh sumber data, dalam hal ini adalah masyarakat yang menjatuhkan pilihannya kepada calon terpilih. Kemudian yang dijadikan subjek disini penulis menentukan informan, yaitu:

1. Ketua DPW PBB Provinsi Kalbar
2. Ketua DPC PBB Kota Pontianak
3 Ketua PAC tingkat Kecamatan (Pontiank Kota)
4. 2 orang Caleg dari PBB Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1
5. 4 orang Tokoh masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota
6. 4 orang Masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota.

Adapun objek penelitian ini adalah Sosialisasi Politik Partai Bulan Bintang Di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen dalam pengumpulan data adalah peneliti sendiri, yaitu instrumen dalam wawancara, pedoman wawancara (*interview guide*) berupa daftar pertanyaan yang tujuannya adalah agar pertanyaan tidak keluar dari fokus penelitian.

Dalam melakukan sebuah penelitian biasanya menggunakan alat atau instrumen untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Tujuannya supaya data yang dikumpulkan berupa yang valid dan akurat bukan data yang sembarangan. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2011:223), bahwa: Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan

sebagai instrumen penelitian utama Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Teknik keabsahan data adalah suatu tehnik yang dilakukan untuk menganalisa dan menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai tehnik untuk memeriksa keabsahan data.

Penelitian menggunakan triangulasi dalam penelitian ini adalah mengacu pada pendapat Moleong (2004 :330) sebagai tehnik untuk mengecek keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1. Faktor Penghambat Sosialisasi Politik

Dalam hubungannya dengan sosialisasi politik, partai politik menjadi sarana sosialisasi politik dalam usaha menguasai pemerintahan melalui perjuangannya dalam pemilihan umum partai politik harus menciptakan dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai politik berusaha menciptakan *image* bahwa ia mewakili rakyat, karena itu selain menanamkan solidaritas dengan partai, juga harus dapat mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan berusaha menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan nasional (Budiardjo, 1996:164). Partai politik apapun itu akan melaksanakan fungsi partai politik yang sama tetapi segabaimana dasarnya partai politik merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang bersatu, pastilah memiliki tujuan partai politik sebagai warna dalam partainya.

Demikian juga pada Partai Bulan Bintang yang memiliki tujuan dan pergerakan. PBB sebenarnya sudah menjalankan fungsi fungsi partai politik dengan baik, akan tetapi dalam upaya sosialisasi politik Partai Bulan Bintang di Kecamatan Pontianak Kota pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 belum berjalan dengan optimal di karenakan Partai Bulan Bintang tidak menonjolkan adanya usaha yang konkret dan cenderung masih bersifat tertutup, kurang membaur terhadap masyarakat dan tidak mengambil simpati masyarakat untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Karena inilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang Sosialisasi Politik Partai Bulan Bintang di Kecamatan Pontianak Kota pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

Salah satu fungsi partai politik adalah sosialisasi politik, sosialisasi politik merupakan pewaris nilai-nilai politik dari satu generasi kegenerasi lain, disosialisasikan melalui agen-agen sosialisasi. Sosialisasi politik juga dipengaruhi oleh status Sosial Ekonomi masyarakat pada suatu bangsa yang tentunya sangat berpengaruh pada budaya politik suatu bangsa. Dalam hal ini yang menjadi agen-agen sosialisasi politik dalam masyarakat adalah : keluarga, sekolah, *peer group* atau kontak langsung pekerjaan dan media massa. Sosialisasi politik berperan

dalam mengubah pertahanan dan budaya politik. Dalam konteks politik negara indonesia dengan sistem demokrasi indonesia yang berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Secara langsung maupun tidak langsung arah politik indonesia mengarah pada kandungan yang terdapat dalam pancasila itu sendiri.

D. 2. Kendala Pola Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang.

Sebagai agen sosialisasi politik Partai Bulan Bintang harus dapat mensosialisasikan partainya melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga dapat diterima masyarakat agar masyarakat simpati kepada Partai Bulan Bintang.

Pola sosialisasi yang tepat di dalam suatu partai akan mudah diterima oleh para kader-kader Partai Bulan Bintang dan sebaliknya juga jika pola sosialisasi tersebut tertutup dan belum optimal akan terjadinya kegagalan dan tidak dapat diterima oleh kader-kader Partai Bulan Bintang dan masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota.

D. 3. Kendala Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang mengenai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya, pengaturan rumah tangga keadaan sosial ekonomi yang rendah pada umumnya berkaitan erat dengan berbagai masalah kesehatan yang di hadapi, hal ini di sebabkan karena ke tidakmampuan dan ketidaktahuan dalam mengatasi berbagai masalah tersebut. Kondisi sosial ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam sebuah partai politik baik dalam negara yang baru berkembang maupun pada negara yang sudah mantap. Status sosial ekonomi mempunyai pengaruh langsung pada lembaga-lembaga publik yang formal. Persoalan ekonomi tidak dapat dipungkiri sebagai aspek yang berpengaruh bagi sebuah partai politik dalam membangun sebuah lembaga organisasi yang telah dibentuk di dalamnya. Untuk membentuk sebuah organisasi yang sempurna perlu biaya yang sangat besar karena dengan demikian kesediaan anggaran dana besar menurunkan hal yang mutlak harus dimiliki.

D.4. Kendala Sistem Politik

Sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya dan mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya atau dengan cara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara. Sistem politik merupakan organisasi melalui masyarakat yang berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut sistem politik harus selalu seimbang dan mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur seperti parlemen,

birokrasi, badan peradilan dan partai politik.dan memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

Sistem politik di haruskan melakukan pengelolaan yang terstrukur agar sistem politik yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan sistem politik di lakukan juga harus sesuai dengan sistem yang berlaku. Seperti sistem politik dalam menarik kader, tidak semua orang dapat masuk dalam sebuah partai jika orang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat menjadi kader.

E. PENUTUP

Dari tiga faktor penghambat sosialisasi politik Partai Bulan Bintang di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 seperti kendala pola sosialisasi politik, kendala sosial ekonomi dan kendala sistem politik penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala pola sosialisasi politik lah yang sangat berpengaruh dalam terhambatnya sosialisasi politik Partai Bulan Bintang di Kecamatan Pontianak Kota Dapil 1 pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

1. Kendala Pola Sosialisasi Politik
   Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang. Kendala pola sosialisasi politik merupakan tahapan-tahapan yang dilalui suatu partai dalam pelaksanaan sosialisasi politiknya.

   Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa : anggota Partai Bulan Bintang menganggap dirinya sudah melakukan sosialisasi politik secara terbuka dan di tempat umum, namun pada kenyataannya di lapangan bahwa masyarakat masih menganggap Partai Bulan Bintang merupakan partai yang tidak sepenuhnya menonjolkan adanya usaha yang benar-benar konkret di lakukan oleh partai tersebut dan setiap melakukan sosialisasi hanya pada intern saja dan Partai Bulan Bintang pun kurang membaur kepada masyarakat Dengan demikian Partai Bulan Bintang kurang mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota. Sosialisasi yang mereka gunakan selalu demikian tidak pernah dari mereka untuk merubah sosialisasi ketempat-tempat umum agar masyarakat dapat melihat secara langsung sosilisasi politik tersebut. Selain itu dalam kegiatan kampanye terbuka baik itu secara langsung ataupun tidak langsung tim ataupun pelaksana mengikutsertakan atau memobilisasi anak (remaja) di libatkan dalam kampanye.
2. Kendala Sosial Ekonomi
   Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang mengenai usaha manusia dalam

YOGIE ANDREAN, NIM. E02112023
Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN

memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya, pengaturan rumah tangga keadaan sosial ekonomi yang rendah pada umumnya berkaitan erat dengan berbagai masalah kesehatan yang di hadapi, hal ini di sebabkan karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan dalam mengatasi berbagai masalah tersebut. Sosial ekonomi yakni lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai dalam membangun suatu organisasi politik dan rendahnya tentang pengetahuan politik menyebabkan beban ganda bagi partai tersebut.

Persoalan ekonomi tidak dapat dipungkiri sebagai aspek yang berpengaruh bagi sebuah partai politik dalam membangun sebuah lembaga organisasi yang telah dibentuk di dalamnya. Untuk membentuk sebuah organisasi yang sempurna perlu biaya yang sangat besar karena dengan demikian kesediaan anggaran dana besar menurunkan hal yang mutlak harus dimiliki. Seperti pada Partai Bulan Bintang ketika dalam melakukan sebuah kegiatan seperti dalam melakukan sosialisasi politik Partai Bulan Bintang terdapat kendala berupa dana yang terkadang membuat kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

3. Kendala Sistem Politik

   Sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya dan mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya atau dengan cara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara. Sistem politik yakni keseimbangan dalam partai politik selalu berubah sehingga system politik dalam sebuah partai politik lebih bersifat dinamis ketimbang statis.

   Sebuah organisasi partai akan kuat apabila sistem politik dari partai tersebut sudah mantap, karena sebuah partai akan menjadi penting apabila dapat mempengaruhi kapasitas sistem politik untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan untuk mendapatkan partisipasi politik. Faktor kurangnya saluran kelembagaan yang diperlukan Partai Bulan Bintang dalam melakukan sosialisasi menjadi penghambat sistem politik mereka.

F. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya setiap melakukan sosialisasi politik harus lebih gencar dan lebih menonjolkan lagi citra partai di ruang-ruang publik agar masyarakat itu bisa merasakan dan melihat apa yang menjadi gagasan,

ide, dan program partai itu sendiri yang tentunya memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Meskipun Partai Bulan Bintang merupakan partai Islam tetapi tidak semua masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota itu beragama Islam, ada juga masyarakat yang beragama non muslim. Sebaiknya jangan terlalu mengedepankan agama untuk menarik dukungan dan simpati masyarakat, karena tidak semua masyarakat dapat menerima sosialisasi politik melalui agama. Sudah seharusnya bagi Partai Bulan Bintang merubah sosialisasi politiknya dari yang lebih intens di intern saja lebih terbuka di ruang-ruang publik, dari yang awal nya lebih cenderung tertutup lebih merubah untuk lebih terbuka dan lebih dekat kepada masyarakat, agar semua masyarakat dapat melihat atau ikut serta berpartisipasi dalam sosialisasi politik tersebut.

2. Meskipun banyak kegiatan yang di lakukan dengan ekonomi yang besar, akan tetapi masih ada juga kegiatan yang bersifat positif yang hanya memerlukan ekonomi yang sedikit, jadi jangan tunggu ada dana yang banyak dulu baru melakukan setiap kegiatan. Karena untuk menarik simpati masyarakat tidak hanya dengan kegiatan yang mewah atau besar, kegiatan yang kecil juga dapat menarik simpati masyarakat tetapi kegiatan tersebut harus bermanfaat buat masyarakat. Sedangkan untuk mendapatkan dana seharusnya jangan hanya mengharapkan sumbangan dari kader-kader, tetapi buatlah sebuah usaha agar dapat membatu ekonomi pada Partai Bulan Bintang
3. Seharusnya sistem politik harus di buat sedemikian mantap agar sistem politik pada Partai Bulan Bintang bisa bejalan dengan lancar.

G. REFERENSI

Almond, Gabriel. 1990. ***Budaya Politik, Tingkah Laku, Demokrasi di Lima Negara.***Jakarta : Bumi Aksara

Budiardjo, Mariam. 2008. ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Budimansyah, Dasim dan Dikdik Baehaqi Arif. 2008. ***Pemilihan Umum***. Bandung : Genesindo

Dhakidae, Daniel. 2004. ***Partai-partai Politik Indoneia Ideologi dan Program 2004-2009.*** Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Firmanzah. 2011. ***Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)***. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Gatara, Said. Dan Dzulkiah Said. 2007. ***Sosialisasi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian***. Bandung : Pustaka Setia.

Mukarom, Zaenal. 2016. ***Komunikasi Politik***. Bandung : CV Pustaka Setia.

Moestafa dan Joko J. Prihatmoko. 2008. ***Menang Pemilu di tengah Oligarki Partai***. Yogjakarta : Pustaka Pelajar.

Moleong, Lexi. 2000. ***Metode Penelitian Kualitatif*.**Bandung : Rajawali Rosda Karya

Rohaniah, Efriza. 2015. ***Pengantar Ilmu Politik, Kajian Mendasar Ilmu Politik***. Malang : Intrans Publishing.

Rianse, Usman dan Abdi. 2009. ***Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi***. Bandung : Alfabeta.

Rush, Michael dan Philip Althoff. 2008. ***Pengantar Sosiologi Politik***. Jakarta : Rajawali Pers.

Rush, Michael dan Philip Althoff. 2011**.** ***Pengantar Sosiologi Politik***. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Sumarno. 1990. ***Pendapat Umum Dalam Sistem Politik***. Bandung : Penerbit Citra Adytia Bakti.

Sugiyono. 2011. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D***. Bandung : Alfabeta.

Sumber lainnya :

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu

Sumber Jurnal :

Artis. 2012. ***Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia.*** Jurnal Sosial Budaya Volume. 9 No.1 Januari -Juli 2012

Leli Salman Al farisi, 2015. ***Partai Politik dan Demokrasi : Masihkah Partai Politik Sebagai Pilar Utama dalam Demokratisasi Pemerintahan Indonesia***. Jurnal Aspirasi Vol 6 No. 1 Agustus 2015

Marulak Pardede, 2014. ***Implikasi Sistem Pemilu Indonesia***. Jurnal Rechts Vinding Volume 3 Nomor 1 April 2014

Yusa Djuyandi. 2014. ***Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum***. Jurnal Humaniora Volume 5 No.2 Oktober 2014 : 1202-1212

Sumber Internet :

http://id.wikipedia.org./wiki/partai_politik_di_indonesia

http://www.smartedu.web.id/2016/11/sosialisasi-politik-menurut-para-ahli.html. Di akses pada tanggal 5 september 2017

https://aeyogy.wordpress.com/2014/04/10/rekap-hasil-quick-qount-berbagai-lembaga-survei-pemilu-2014/respond. Di akses pada tanggal 2 Oktober 2017

SKRIPSI

Eparia (2015) dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi di Kelurahan Darat Sekip Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat)

Yenny Wahyunny (2015) dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Kabupaten Kubu Raya

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK